

Judul : Tantangan Legitimasi Legislasi DPR
Tanggal : Senin, 28 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

Tantangan Legitimasi Legislasi DPR

Hampir dua tahun bekerja. Dewan Perwakilan Rakyat tak cukup sekadar giat membuat undang-undang. Produknya juga harus diterima publik dan menjawab persoalan rakyat.

**A Yoga Prasetyo dan
Yohanes Advent
Krisdamarjati**

Membuat undang-undang adalah salah satu tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat yang diamanatkan konstitusi. Aturan yang dihasilkan DPR menjadi landasan hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar terencana, DPR menyusun daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam program legislasi nasional.

Sejak dilantainya 1 Oktober 2024, DPR periode 2024-2029 hampir ganz tahun bekerja. Pada masa sidang 2024-2025, yang menjadi masa transisi, DPR telah menghasilkan 14 undang-undang. Adapun pada masa sidang 2025-2026, hingga 1 September 2026, DPR telah merumuskan pembahasan 16 RUU.

Tahun ini, DPR menetapkan 8 RUU prioritas, yaitu: (1) Undang-Undang Nasional (Prologema) Prioritas 2025. Di antaranya RUU Penyiaran, RUU Perampasan Asat, RUU Jahatan Hakim, RUU Hakuk Adu Perdata, RUU Narkotika, RUU Ratu, RUU Ratu Ratu, RUU Perketetapan, dan RUU Asat Data Indonesia. Ada pula versi UU Pemula.

rupsi disetujui. Dessakan pengesahan RUU ini pernah disetujui pada tuntuatan "17-8" saat unjuk rasa Agustus 2025.

Dukung dengan catatan

Meski paling ramak dibicarakan, dukungan terhadap RUU Perampasan Asat belum kuat. Sekitar 571 persen warganet menerima RUU Perampasan Asat sebagai netral, dan 21 persen menolak. Tingkat penolaknya 55 persen. Penolakan yang kecil itu pun sebagian besar bukan sikap pengungahan, melainkan tuduhan bahwa pihak lain, seperti DPR dan partai tertentu, menolak RUU ini.

Keraguan justru tampak dalam dukungan yang disartai sa-

Namun, tidak semua agenda itu menarik perhatian publik. Hal ini terlihat dari percakapan yang beredar di media sosial pada 17 Agustus 8 September 2022. Peristiwa Kompass Monitoring dengan kata kunci "rancangan undang-undang", "RUT DPR", dan "demonstrasi DPR", terkumpul 222.292 ungahan dan komentar dari enam platform, yakni Facebook, Instagram, Threads, TikTok, dan X. Hal yang menarik adalah untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai topik percakapan dan sikap warganet terhadap RUT dan UU buatan DPR.

Hasilnya, ada enam RUU dan UU yang paling banyak dibicarakan, yakni RUU Perampasan Aset, UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), RUU Peroperasian, RUU Ketenagakerjaan, UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan RUU Keuangan Negara (omnibus).

Keenamnya dekat dengan keresahan warga saat ini, mu-

Meski begitu, warganet tetap memberi catatan.

lai dari korupsi yang marak, sekap terjang ormas, prioritas anggaran negara, perlindungan pekerja, hingga kekhawatiran kenaikan pajak *in this economy* atau di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah.

Di antara semuanya, RUU Perampasan Asat paling banyak disebut, yakni 70,3 persen dari seluruh penyebutan RUU. Rata-rata pembicaraan tak lepas dari unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang menuntut RUU yang tengah dibahas Komisi III DPR ini segera disahkan dan kasus korupsi diusut tuntas. Desakan pengesahan RUU ini pernah diuraikan pada tuntutan "17-8" saat unjuk rasa Agustus 2025.

Dukung dengan catatan

Meski paling ramai dibicarakan, dukungan terhadap RUU Perampasan ASU belum bulat. Sebanyak 57,1 persen warga net menerima RUU Perampasan ASU, 40,8 persen netral, dan 2,1 persen menolak. Tingkat penerimaannya 55 persen. Penolakan yang kecil itu pun sebagian besar bukan sikap pengungghanya, melainkan tuduhan bahwa pihak lain, seperti DPR atau tokoh partai tertentu, menolak RUU ini.

Keraguan justru tampak dari dukungan yang disertai syarat. Syarat yang paling sering muncul, perampasan aset harus satu paket dengan hukuman mati dan pemiskinan koruptor. Warganet juga meminta obyek perampasan diperjelas agar tidak ada pasal karet yang bisa menjerat warga biasa, serta menuntut jaminan bahwa aparat benar-benar menegakkannya.

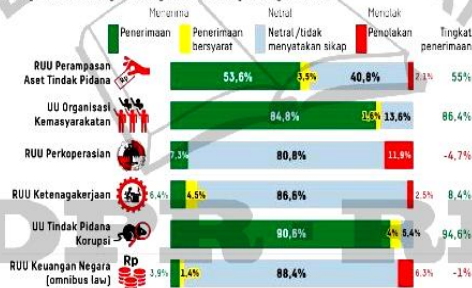
Dukungan terhadap RUU ini sekaligus menjadi cara war-ganet menyatakan ketidakper-cayaan kepada DPR. RUU yang tak kunjung disahkan dibaca sebagai upaya DPR melindungi diri sendiri. Waranet kerap mengutip permintaan Presiden agar RUU ini segera disahkan untuk menegaskan bahwa hambatananya ada di DPR.

Berbeda dengan RUU Perampasan Aset, tingkat penerimaan UU Tipikor (94,6 persen) dan UU Ormas (86,4 persen) jauh lebih tinggi. Porsi penolakan keduanya 0 persen. Meski begitu, warganet tetap memberi catatan.

RUU yang Menjadi Atensi Warganet



Sikap dan Pandangan Warganet terhadap Beragam RUU



Metode Pengumpulan Data
Data diumpukan melalui aplikasi "Kompas Monitoring" dengan memasukkan kata kunci "Monitoring Undang-Undang RI, DPR, dan demonstrasi DPR" pada periode 1 Agustus-8 September 2022. Terkumpul 222.292 konten dan komentar yang relevan dari 14.802 pengguna. Data ini, beserta foto, video dan lain-lain.

Sumber Kompas Monitoring Diambil dari Kompas.com

Pada UU Tipikor, tuntutan-pidana sederhana dan terus diulang: hukuman mati dan pemiskinan koruptor. Vonis keadilan koruptor saat ini dinilai terlalu ringan sehingga tak membuat jera. Sebagian warga net paham ancaman pidana mati sudah ada dalam UU Tipikor, tetapi belum pernah dijatuhkan. Karena itu, yang di-tuntut adalah penegakannya.

Wargonet juga menyoroti celah perampasan aset dalam UU Tipikor. Perampasan harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap dan sulit dilakukan jika terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, atau diwonis bebas. Selain itu, UU ini dinilai tidak memungkinkan penyisihan aset koruptor secara paksa.

Pada UU Ormas, pertanyaan yang sering muncul adalah untuk apa ormas ikut menertibkan massa jika sudah ada polisi. Warganet berharap aturan ini menjamin ketertiban dan menghentikan kekerasan, intimidasi, serta pungutan liar oleh ormas. Syaratnya, penerbitan tak boleh tebang pilih.

Dipertanyakan manfaatnya

Sinasi berbeda terlihat pada RUU Ketenagakerjaan, RUU Kemangan Negara, dan RUU Perkoperasian. Ketiganya minim dukungan. Bahkan, RUU Perkoperasian dan RUU Keuangan Negara lebih banyak ditolak daripada diterima. RUU Perkoperasian, misalnya, ditolak 11,9 persen warganet, sementara yang menerima 7,3 persen.

Penekanan terhadap RUU Perkoperasian berkaitan dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Warganet mengkhawatirkan beban anggaran negara, potensi korupsi, serta nasib UMKM dan warung desa yang bisa tersaingi. Banyak pula yang menilai bahwa program itu lebih bermanfaat bagi pendidikan dan kesehatan. Semua itu bermuara pada pergunjungan, seberapa besar manfaatnya untuk masyarakat?

Menyoal manfaat juga menjadi sorotan pada RUU Ketenagakerjaan. Tuntutan yang paling sering muncul adalah penghapusan sistem alih daya (*outsourcing*), yang dinilai membuat status kerja tidak pasti dan upah tertekan. Warganet berharap RUU ini me-

muat pasal-pasal yang lebih jelas untuk melindungi hak dasar pekerja, disertai pengawasan yang ketat.

Porsi netral yang mencapai 86,6 persen bukan berarti war-ganet tak peduli. Percakapan mereka lebih banyak berupa cerita pengalaman, seperti upah di bawah ketentuan dan gaji tertunggak, yang belum di-rumuskan menjadi tuntutan kebijakan.

Adapun pada RUU Keuangan Negara, yang dipersiapkan pemerintah bukan kewajiban membayar pajak, melainkan penggunaannya. Mereka bersedia membayar asalkan hasilnya kembali dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penolakan diarahkan pada pemborsan anggaran dan kenaikan pajak daerah. Contoh yang dirujuk wartawan adalah aksi warung Pati, Jawa Tengah, menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan pada Agustus 2025.

Benang merah perhatian wartawan terhadap RUU-RUU ini bermula pada keresahan yang sedang dihadapi bangsa sekarang: korupsi yang menggerogoti kemakmuran rakyat, perlindungan pekerja di tengah badai PHK, dan anggaran negara yang diharapkan berpihak pada rakyat yang sedang kesulitan.

Undang-undang adalah fundasi sistem hukum nasional dan tata kelola negara yang demokratis dan berkeadilan. Menurut Inter-Parliamentary Union (IPU), kualitas legislasi setidaknya harus memenuhi dua aspek, yakni legalitas dan efektivitas. Efektivitas tampak dari kemampuan parlemen membuat undang-undang berkualitas secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan zaman. Adapun legalitas antara lain tercermin dari partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Di era digital, media sosial kini menjadi ruang baru bagi publik untuk berpartisipasi sekaligus mengawasi kerja legislasi DPR. Suara warganet menegaskan satu hal: legitimasi legislasi DPR tidak cukup diukur dari banyaknya undang-undang yang dibuat, tetapi juga dari sejauh mana aturan itu diterima dan mampu menjawab persoalan publik.

(LITBANG KOMPASS)

(LITBANG KOMPAS)